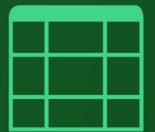


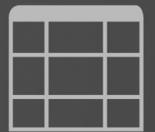
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT LAPANGAN USAHA

2013-2017



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT LAPANGAN USAHA

2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
MENURUT LAPANGAN USAHA 2013-2017**

ISSN : 2338.543X
Nomor Publikasi : 12040.1802
Katalog BPS : 9302021.1204

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 95 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Dicetak Oleh:

CV. Bima Masa

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
MENURUT LAPANGAN USAHA 2013-2017**

Tim Penyusun :

Penanggung Jawab Umum : Drs. Anggiat Tulus Sibagariang

Penanggung Jawab Teknis : Dwi Asih Septi Wahyuni, SST, M.Si

Penyunting : Irwanto, S.Kom

Penulis : Dwi Asih Septi Wahyuni, SST, M.Si

Pengolah Data : Dwi Asih Septi Wahyuni, SST, M.Si

Gambar Kulit : Brian Firdian, SST dan Irwanto S.Kom

<https://tapanulitengahkab.das.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. Publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dengan penyempurnaan ruang lingkup serta metodologi yang mengacu pada sistem neraca nasional terbaru (*System of National Accounts/SNA 2008*).

Publikasi ini memuat tinjauan mengenai perkembangan perekonomian Tapanuli Tengah yang disajikan secara deskriptif. Disamping itu, disajikan pula tabel-tabel PDRB tahun 2013-2017 atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Sebagai pelengkap ulasan tabel-tabel tersebut, disajikan pula konsep, definisi dan penjelasan PDRB menurut lapangan usaha. Beberapa angka yang disajikan masih bersifat sangat sementara, terutama angka tahun 2017 karena belum tersedianya data secara lengkap dan akan disempurnakan pada penerbitan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Saran perbaikan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Pandan, Agustus 2018

Kepala,



Drs. Anggiat Tulus Sibagariang

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	3
1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	4
1.3. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	4
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	11
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13
2.2 Pertambangan dan Penggalian	19
2.3 Industri Pengolahan	21
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas	28
2.5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30
2.6 Konstruksi	31
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32
2.8 Transportasi dan Pergudangan	34
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38
2.10 Informasi dan Komunikasi	40
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	41
2.12 Real Estat	49
2.13 Jasa Perusahaan	50
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52
2.15 Jasa Pendidikan	53
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53
2.17 Jasa Lainnya	54

BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	59
	3.1 PDRB Tapanuli Tengah	61
	3.2 Struktur Perekonomian	62
	3.3 Pertumbuhan Ekonomi	63
	3.4 PDRB Per Kapita	65
	3.5 Sumber Pertumbuhan	66
BAB IV	PERKEMBANGAN PRDB MENURUT LAPANGAN USAHA	69
	4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	71
	4.2 Pertambangan dan Penggalan	73
	4.3 Industri Pengolahan	74
	4.4 Pengadaan Listrik dan Gas	76
	4.5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76
	4.6 Konstruksi	77
	4.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	78
	4.8 Transportasi dan Pergudangan	80
	4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81
	4.10 Informasi dan Komunikasi	82
	4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	82
	4.12 Real Estate	83
	4.13 Jasa Perusahaan	84
	4.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	85
	4.15 Jasa Pendidikan	85
	4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86
	4.17 Jasa Lainnya	87
LAMPIRAN		91

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	7
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	8
Tabel 1.3	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	9
Tabel 3.1	PDRB Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2017 (Juta Rupiah)	61
Tabel 3.2	Perbandingan PDRB dan Peranan PDRB Tapanuli Tengah ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2017 di Sumatera Utara (Miliar Rupiah)	61
Tabel 3.3	Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Persen)	62
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Persen)	64
Tabel 3.5	PDRB perkapita Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2017 (Ribu Rupiah)	65
Tabel 4.1	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2013-2017	71
Tabel 4.2	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, 2013-2017 (Persen)	72
Tabel 4.3	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, 2013-2017	74
Tabel 4.4	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2013-2017	75
Tabel 4.5	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, 2013-2017 (Persen)	76
Tabel 4.6	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 2013-2017	77

Tabel 4.7	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi, 2013-2017	78
Tabel 4.8	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2013-2017	79
Tabel 4.9	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2013-2017 (Persen)	81
Tabel 4.10	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, 2013-2017.....	82
Tabel 4.11	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estate, 2013-2017	84
Tabel 4.12	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, 2013-2017	84
Tabel 4.13	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 2013-2017	85

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 3.1	Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017 (Persen)	63
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara, 2013-2017 (Persen)	64
Grafik 3.3	PDRB per kapita Tapanuli Tengah ADHB dan ADHK 2010, 2013-2017 (Ribu Rupiah)	66
Grafik 3.4	Sumber Pertumbuhan PDRB Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Persen)	66
Grafik 4.1	Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, 2013-2017 (Persen)	73
Grafik 4.2	Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2013-2017 (Persen)	75
Grafik 4.3	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi, 2013-2017 (Persen)	79
Grafik 4.4	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, 2013-2017 (Persen)	80
Grafik 4.5	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, 2013-2017	83
Grafik 4.6	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2013-2017	87

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Juta Rupiah)	91
Tabel 2. PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Juta Rupiah)	92
Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Persen)	93
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Persen)	94
Tabel 5. Laju Pertumbuhan dan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah, 2013–2017 (Persen).....	95



<https://tapanuliherald.com/kab.bps.go.id>



PENJELASAN UMUM



1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala. Data/indikator statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR):**

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- **Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM)**

- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

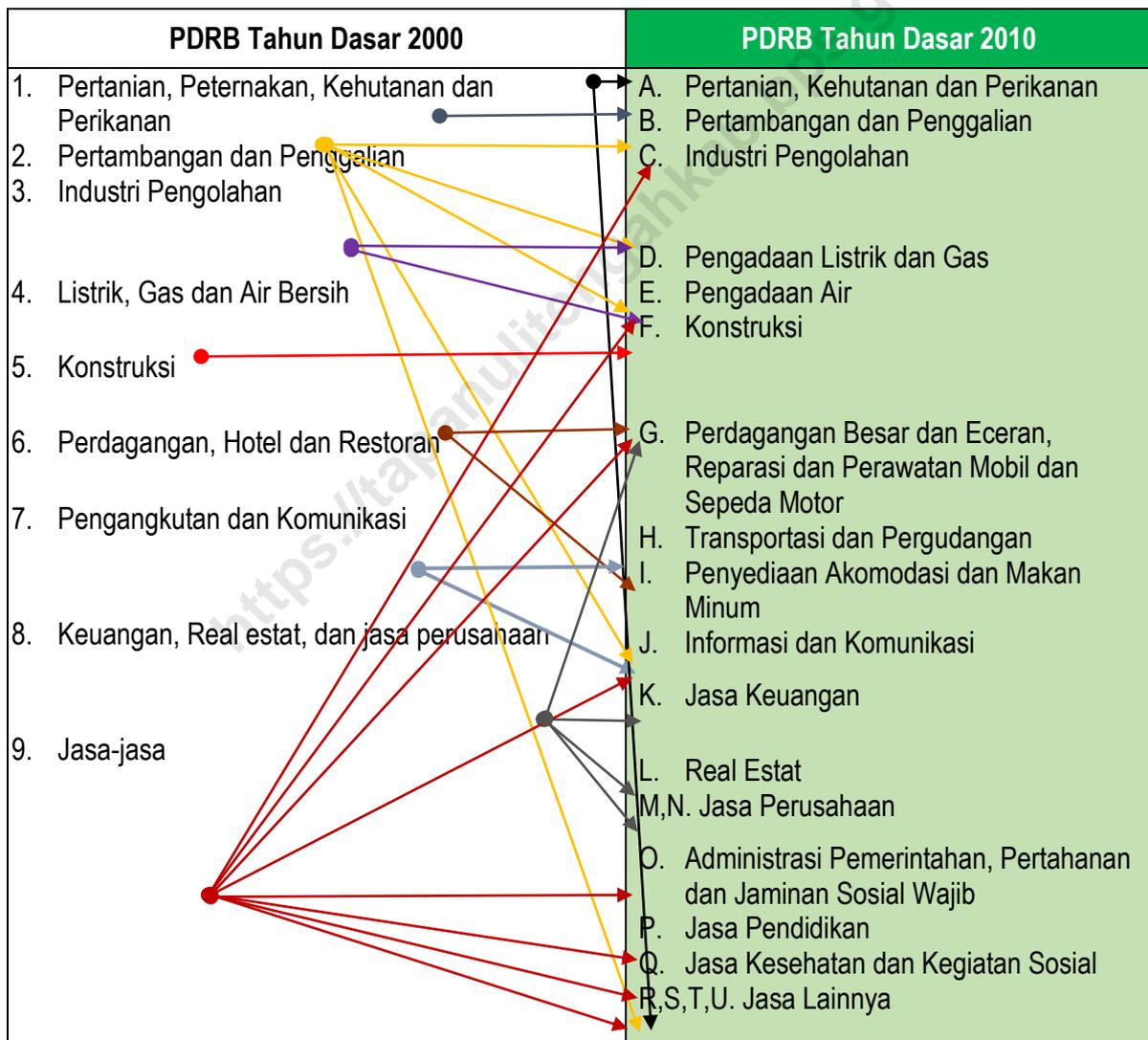
Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Valuasi	Harga Produsen:	Harga Dasar:
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor



2

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam subkategori tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar

petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela,

rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bidang Produksi Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Sensus Pertanian, dan Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output

kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS RI. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS RI. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Sensus Pertanian. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Sensus Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil

Sensus Pertanian, Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 *Pertambangan dan Penggalian*

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 **Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi**

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Sensus Ekonomi. Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Lap. Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyarinagan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subsektor pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauxit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana

meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak

dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16

2.3.7 Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga

kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Subkategori ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di subkategori ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan

tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari subkategori ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Subkategori ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Sensus Ekonomi dan Survei IBS Tahunan Bidang Statistik Produksi Provinsi Sumatera Utara. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Sensus Ekonomi dan Survei IBS Tahunan Bidang Statistik Produksi Provinsi Sumatera Utara. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi, BPS dengan kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS RI; sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS RI. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas, BPS RI.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Sensus Ekonomi dan Survei IBS Tahunan Bidang Statistik Produksi Provinsi Sumatera Utara; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS RI ; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan

dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku

maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan yang digunakan untuk seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas

dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir. Sumber data Produksi Es menggunakan data Sensus Ekonomi, dan harga diestimasi dari harga produsen.

2.5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data: untuk data Produksi adalah data produksi air bersih PDAM Tirtanadi, data Harga berasal dari harga produsen air bersih PDAM Tirtanadi. Data Output Sampah diperoleh dari estimasi jumlah rumah tangga per kabupaten/kota dikalikan estimasi pengeluaran untuk pengelolaan sampah per rumah tangga SUSENAS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data berasal dari realisasi APBN/APBD untuk belanja modal provinsi dan kabupaten/kota, data harga konstruksi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara, data konstruksi dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan estimasi SUSENAS dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan

maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk

mendapatkan nilai tambah konstannya, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, estimasi SUSENAS untuk pengeluaran pembelian kendaraan bermotor, dan reparasi kendaraan bermotor, Statistik Transportasi (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai

ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan perusahaan angkutan darat *go public*. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai

ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan perusahaan pelayaran swasta lainnya dan IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS RI. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan BPS RI dan Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS RI. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Airlines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan

membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura II, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Jasa Marga, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga

berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS RI dan Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi subkategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 – Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi – BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari

berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari estimasi pengeluaran rumah tangga untuk informasi dan komunikasi SUSENAS dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari pendekatan alokasi kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak

tertanggung. Subkategori ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari pengeluaran untuk asuransi rumah tangga SUSENAS dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan pengeluaran untuk asuransi perusahaan dari struktur biaya Survei Khusus Neraca Produksi. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari estimasi pengeluaran/penerimaan dana pensiun rumah tangga dari SUSENAS, Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari PT Pegadaian. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan *leasing* lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa

(*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks

Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai

Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari Sensus Ekonomi dari direktori perusahaan Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan

outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari

hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut subkategori kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBD; Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 *Jasa Lainnya*

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan

deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara, dan Survei-survei Khusus yang Dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir,

dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas dan Sensus Penduduk dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara, Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Customs Organization(WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara dan Statistik Harga Konsumen.



3

TINJAUAN PEREKONOMIAN



3.1. PDRB Tapanuli Tengah

PDRB Tapanuli Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mencapai 8 555 475,88 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 6 348 241,23 juta rupiah. Selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, meskipun selama Tahun 2013 – 2016 menunjukkan pertumbuhan yang melambat, namun pada Tahun 2016 pertumbuhannya mengalami akselerasi dan kembali melambat pada Tahun 2017.

Tabel 3.1 PDRB Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)
2013	5 914 046,08	5 199 017,47
2014	6 516 462,16	5 460 846,09
2015	7 140 275,90	5 738 320,51
2016*	7 849 653,79	6 032 212,59
2017**	8 555 475,88	6 348 241,23

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika dibandingkan antar kabupaten di Sumatera Utara, maka PDRB Tapanuli Tengah menduduki peringkat ke-18. Peranannya terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 1,25 persen.

Tabel 3.2. Perbandingan PDRB dan Peranan PDRB Tapanuli Tengah ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2017 dengan PDRB Sumatera Utara (Miliar Rupiah)

Kabupaten	ADH Berlaku **	ADH Konstan**	Peranan terhadap PDRB Sumatera Utara (%)**
(1)	(2)	(3)	(4)
Tapanuli Tengah	8 555,48	6 348,24	1,25
Sumatera Utara	684 069,49	487 531,23	100,00

** Angka sangat sementara

3.2. Struktur Perekonomian

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Tapanuli Tengah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Tapanuli Tengah. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diikuti lapangan usaha Konstruksi, Industri Pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 3 (tiga) persen.

Tabel 3.3 Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,91	47,74	47,25	46,68	46,30
B Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
C Industri Pengolahan	12,06	12,02	11,71	11,58	11,54
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,59	0,54	0,50	0,48	0,57
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
F Konstruksi	10,50	10,95	10,90	11,17	11,73
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,17	10,53	11,05	11,47	11,38
H Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,67	2,73	2,78	2,78
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,42	1,42	1,43	1,44
J Informasi dan Komunikasi	0,63	0,61	0,60	0,59	0,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,02	1,03	1,03	1,03	0,99
L Real Estat	2,00	1,98	1,97	1,98	1,99
M,N Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,11	8,38	8,69	8,69	8,61
P Jasa Pendidikan	1,05	1,03	1,02	1,00	0,97
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,36	0,35	0,34	0,32
R,S,T,U Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

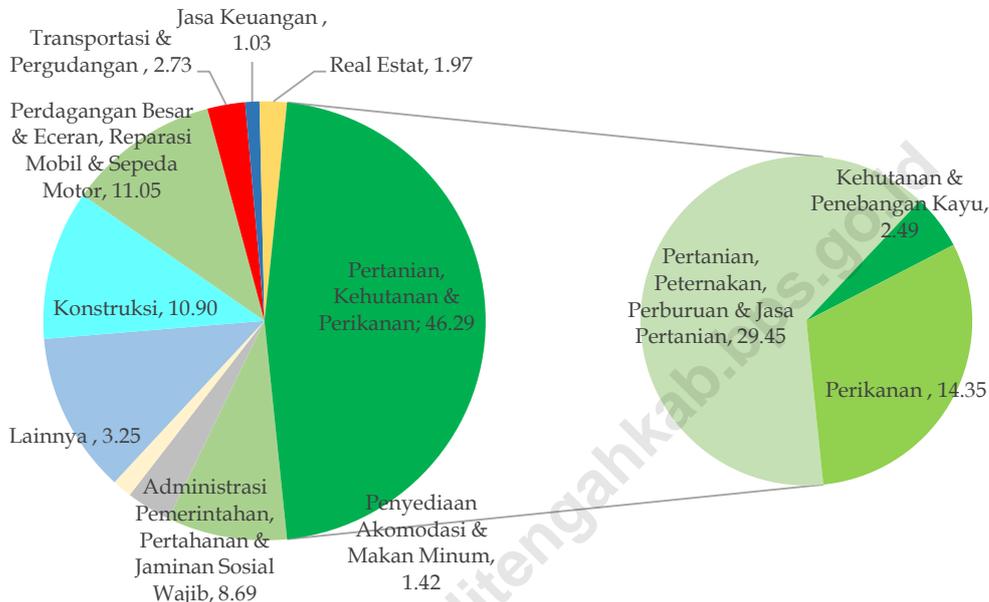
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB merupakan

kontribusi terkecil, yaitu masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,09 persen secara berurutan.

Grafik 3.1 Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2017 (Persen)



Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar. Tahun 2017 sebesar 46290 persen, dengan rincian subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 29,45 persen, Perikanan 14,35 persen dan Kehutanan dan Penebangan Kayu 2,49 persen.

3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Tapanuli Tengah pada tahun 2017 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tapanuli Tengah tahun 2017 mencapai 5,24 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 5,12 persen. Sejak tahun 2014, pertumbuhan ekonomi selalu mengalami percepatan akibat pertumbuhan ekonomi lokal yang cukup kuat.

Semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 16,80 persen, disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar 9,06 persen, dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,05 persen. Sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,25 persen,

Industri Pengolahan sebesar 3,00 persen, dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,50 persen.

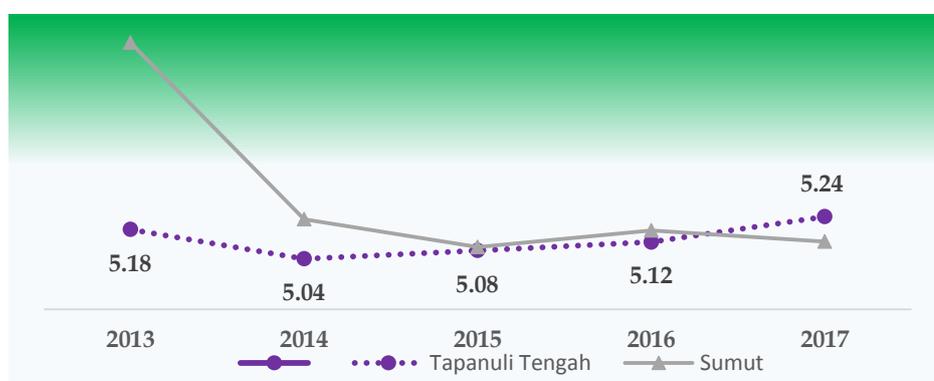
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,85	4,48	4,69	4,77	4,88
B Pertambangan dan Pengalihan	4,21	4,84	5,08	7,00	9,06
C Industri Pengolahan	4,34	3,07	2,53	3,59	3,00
D Pengadaan Listrik dan Gas	2,26	2,45	1,81	5,15	16,80
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,63	5,83	5,65	6,77	7,13
F Konstruksi	6,39	6,50	5,41	5,60	9,05
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,52	5,95	8,14	6,96	6,08
H Transportasi dan Pergudangan	8,72	10,83	4,94	6,54	7,45
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,33	5,56	6,36	7,84	7,72
J Informasi dan Komunikasi	5,50	5,77	6,14	7,25	5,57
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,43	5,73	5,83	4,01	0,50
L Real Estat	4,12	4,38	5,44	5,67	6,12
M,N Jasa Perusahaan	6,16	4,74	5,59	6,02	5,22
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,91	6,92	6,57	5,27	3,25
P Jasa Pendidikan	4,82	5,16	5,48	5,02	5,04
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,82	5,81	3,67	3,25	3,80
R,S,T,U Jasa lainnya	5,76	5,89	6,19	6,10	5,30
Produk Domestik Regional Bruto	5,18	5,04	5,08	5,12	5,24

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara, 2013-2017 (Persen)



Pertumbuhan ekonomi Tapanuli Tengah mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Sumatera Utara yaitu mengalami pertumbuhan yang

melambat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan percepatan pertumbuhan pada 2015 hingga 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami perbedaan pola pertumbuhan karena adanya pembangunan infrastruktur jalan secara merata di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sepanjang tahun, pertumbuhan ekonomi Tapanuli Tengah selalu berada di bawah pertumbuhan Sumatera Utara kecuali pada tahun 2017. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Tapanuli Tengah sebesar 5,24 persen, sedangkan Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,12 persen.

3.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 3.5 PDRB per kapita Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	17,62	8,04	15,49	2,86
2014	19,00	7,84	15,93	2,80
2015	20,40	7,35	16,39	2,95
2016*	21,99	7,81	16,90	3,09
2017**	23,52	6,95	17,45	3,27

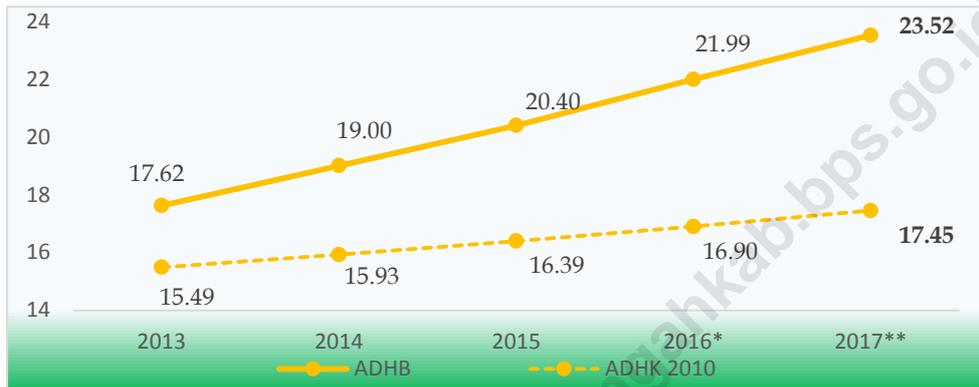
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per kapita Tapanuli Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar 17,62 juta rupiah dan meningkat menjadi 23,52 juta rupiah pada tahun 2017. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2013-2017 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2017, PDRB per kapita Tapanuli Tengah atas dasar harga konstan mencapai 17,45 juta rupiah.

Berdasarkan atas dasar harga konstan, pertumbuhan PDRB per kapita sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami perlambatan dan akselerasi pada Tahun 2015 hingga 2017. Tahun 2013, PDRB per kapita Tapanuli Tengah tumbuh sebesar 2,86 persen, sedangkan tahun 2017 tumbuh sebesar 3,27 persen.

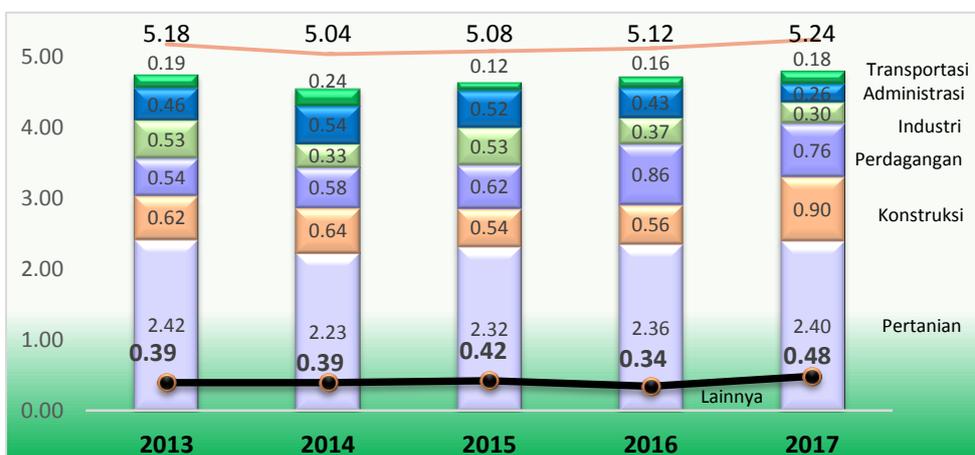
Grafik 3.3 PDRB per kapita Sumatera Utara ADHB dan ADHK 2010, 2013-2017 (Ribu Rupiah)



3.5. Sumber Pertumbuhan

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Tapanuli Tengah dari tahun ke tahun, pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan masih mendominasi kecuali pada tahun 2014, penciptaan sumber pertumbuhan Sumatera Utara tertinggi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Grafik 3.4 Sumber Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Persen)



Tahun 2017, nilai pertumbuhan ekonomi Tapanuli Tengah yang bernilai 5,24 persen, 2,40 persen diciptakan oleh lapangan usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 0,90 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,76 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,30 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan sebesar 0,26 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 0,18 persen, dan lapangan usaha lainnya sebesar 0,48 persen yaitu gabungan dari semua lapangan usaha selain lapangan usaha yang telah disebutkan.

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>



<https://tapanulireg.kab.bps.go.id>

4

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sublapangan usaha. Pemecahan menjadi sublapangan usaha atau sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup sublapangan usaha pertanian, sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sublapangan usaha perikanan. Sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 4.1. PDRB dan Peranan Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta Rupiah)					
- ADHB	2 892 345,1	3 110 744,63	3 373 728,04	3 664 216,25	3 960 772,3
- ADHK 2010	2 587 791,5	2 703 787,01	2 830 577,29	2 965 727,6	3 110 359,4
Proporsi Terhadap Total PDRB(% ADHB)	48,91	47,74	47,25	46,68	46,30
Pertumbuhan (% - ADHK 2010)	4,85	4,48	4,69	4,77	4,88
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4,87	3,81	3,95	4,62	4,34
b. Kehutanan&Penebangan Kayu	2,39	2,85	4,02	-1,36	0,22
c. Perikanan	5,40	6,82	6,93	6,60	7,30

*Angka sementara, ** angka sangat sementara

Tabel 4.2 Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, 2013-2017 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	69,06	67,21	65,63	64,65	63,62
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	5,98	6,45	6,56	6,68	6,69
		1,21	1,29	1,31	1,31	1,35
3	Perikanan	5,90	5,87	5,91	5,76	5,39
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

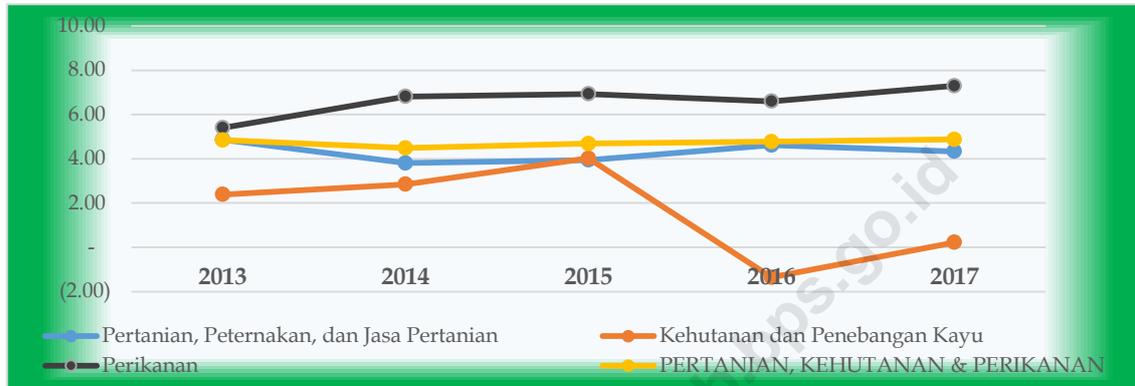
** Angka sangat sementara

Sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu tercatat sebesar 63,62 persen dari seluruh nilai tambah pertanian diikuti oleh sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, serta perikanan yaitu sebesar 6,69 persen dan 5,29 persen. Sublapangan pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terdiri dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Jasa pertanian dan perburuan memberikan kontribusi terbesar pada sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yakni 39,90 persen.

Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 3,96 triliun rupiah, sedangkan nilai PDRB ADHK 2010 mencapai 3,11 triliun rupiah. Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 46,30 persen. Angka ini selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pola perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari lapangan usaha pertanian ke lapangan usaha ekonomi lainnya.

Meski kontribusinya menurun terhadap PDRB, namun pertumbuhan lapangan usaha pertanian justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian mencapai 4,88 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,77 persen. Apabila dirinci menurut sublapangan usaha, maka diperoleh bahwa sublapangan usaha perikanan merupakan sublapangan usaha penyumbang laju pertumbuhan terbesar.

Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Tahun 2017 (Persen)



Seluruh sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian mengalami pertumbuhan positif, bahkan sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu yang tahun 2016 bernilai minus 1,36 persen, di tahun 2017 mampu terdongkrak menjadi sebesar 0,22 persen.

4.2. Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dibagi menjadi empat sublapangan usaha yakni pertambangan minyak, gas dan panas bumi; pertambangan batubara dan lignit; pertambangan bijih logam; dan pertambangan dan penggalian lainnya. Sublapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya merupakan satu-satunya yang dihasilkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, sementara tiga sublapangan usaha yang lainnya tidak dihasilkan.

PDRB lapangan usaha pertambangan dan penggalian tahun 2017 ADHB mencapai 22,48 miliar rupiah, atau sebesar 18,41 miliar rupiah jika menghilangkan pengaruh inflasi (ADHK 2010). Angka ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari kontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB, lapangan usaha ini berkontribusi relatif kecil yaitu hanya mencapai 0,26 dan angka ini tidak mengalami perubahan selama empat tahun terakhir. Meskipun kontribusinya konstan namun laju pertumbuhan PDRB nya meningkat dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencapai 9,06 persen, meningkat dari tahun 2016 yakni 7,00 persen.

Tabel 4.3. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	15 766,4	17 054,64	18 578,98	20 455,46	22 482,8
- ADHK	14 319,2	15 011,85	15 773,87	16 878,04	18 407,8
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	4,21	4,84	5,08	7,00	9,06

*Angka sementara, *** angka sangat sementara

4.3. Industri Pengolahan

Industri pengolahan mengalami pergeseran penyumbang pembentukan PDRB dari terbesar kedua menjadi terbesar ketiga. Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHB lapangan usaha industry pengolahan mencapai 987,123 miliar rupiah atau sebesar 708,594 miliar rupiah jika menghilangkan pengaruh inflasi (ADHK 2010). Dilihat dari kontribusinya, lapangan usaha industri pengolahan menyumbang sebesar 11,54 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka ini terus mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Angka ini menurun sebesar 0,04 persen dari tahun 2016.

Lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) sublapangan usaha. Sublapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar yaitu sublapangan usaha industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman mampu menyumbang sebesar 6,48 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan meningkat dari 6,44 persen di tahun 2015. Sementara sublapangan industri karet, barang dari karet dan plastik menyumbang sebesar 4,73 persen terhadap pembentukan PDRB kabupaten Tapanuli Tengah. Angka ini justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.4. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	713.384,3	783.068,79	836.477,21	908.929,00	987.122,98
- ADHK	628.445,2	647.728,09	664.119,32	687.958,01	708.594,88
Proporsi terhadap Total PDRB	12,06	12,02	11,71	11,58	11,54
(% ADHB 2010)					

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan PDRB lapangan usaha Industri pengolahan mengalami cukup fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2017. Laju pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2017 adalah sebesar 3,00 persen. Angka ini menurun dari 3,59 persen pada tahun 2016.

Grafik 4.2 Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2013-2017 (Persen)



4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Pada tahun 2017 nilai PDRB lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 48,79 miliar rupiah. Angka ini meningkat dari 37,93 miliar di tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami kenaikan yang paling tinggi yakni 16,8 persen pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan produksi es di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017.

Lapangan usaha ini terdiri dari sublapangan usaha ketenagalistrikan dan sublapangan usaha pengadaan gas dan produk es. Kontribusi lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2017 hanya mencapai 0,57 persen atau meningkat 0,09 poin dibandingkan tahun 2016. Angka ini berasal dari sublapangan usaha pengadaan Gas dan Produk Es yang berkontribusi terbesar yaitu 0,5 persen dan sublapangan usaha Ketenagalistrikan berkontribusi sebesar 0,07 terhadap total nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 4.5. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	34,638.44	35,368.15	35,845.61	37,933.06	48,789.26
- ADHK	26,295.57	26,938.97	27,427.11	28,838.54	33,683.20
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	0.59	0.54	0.50	0.48	0.57
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	2.26	2.45	1.81	5.15	16.80

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Lapangan usaha ini juga termasuk juga kegiatan penjernihan dan pengolahan air dan sungai,

danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017 sebesar 0,13 persen. Sementara laju pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2017 mencapai 7,13 persen. Angka ini mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2016 yakni 6,77 persen.

Tabel 4.6. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	6.252,28	7.214,55	8.227,79	9.291,64	10.715,40
- ADHK	5.333,85	5.644,56	5.963,68	6.367,40	6.821,55
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	5,63	5,83	5,65	6,77	7,13

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.6. Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi merupakan penyumbang terbesar kedua dari 17 lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada tahun 2017 PDRB lapangan usaha ini mencapai 1.003,27 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 11,73 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya 620,99 miliar rupiah atau 10,50 persen dan dari tahun 2016 yang mencapai 876,55 miliar rupiah atau menyumbang 11,17 persen dari total PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2017 mencapai 9,05 persen. Angka ini mengalami percepatan dari pertumbuhan pdrb konstruksi tahun 2016 yang mencapai 5,60 persen.

Tabel 4.7. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	620.990,90	713.500,91	778.054,23	876.555,90	1.003.273,70
- ADHK	508.273,31	541.300,75	570.564,59	602.516,20	657.017,00
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	10,50	10,95	10,90	11,17	11,73
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	6,39	6,50	5,41	5,60	9,05

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada tahun 2017, nilai PDRB lapangan usaha ini mencapai 973,72 miliar rupiah meningkat dari 900,26 miliar rupiah dari tahun 2016. Lapangan usaha ini menyumbang sebesar 11,38 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka ini mengalami penurunan dari 11,47 persen pada tahun 2016. Lapangan usaha ini terdiri dari sublapangan usaha perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi dan sublapangan usaha perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor. Adapun sublapangan usaha penyumbang terbesar adalah sublapangan usaha perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor yakni 11,23 persen.

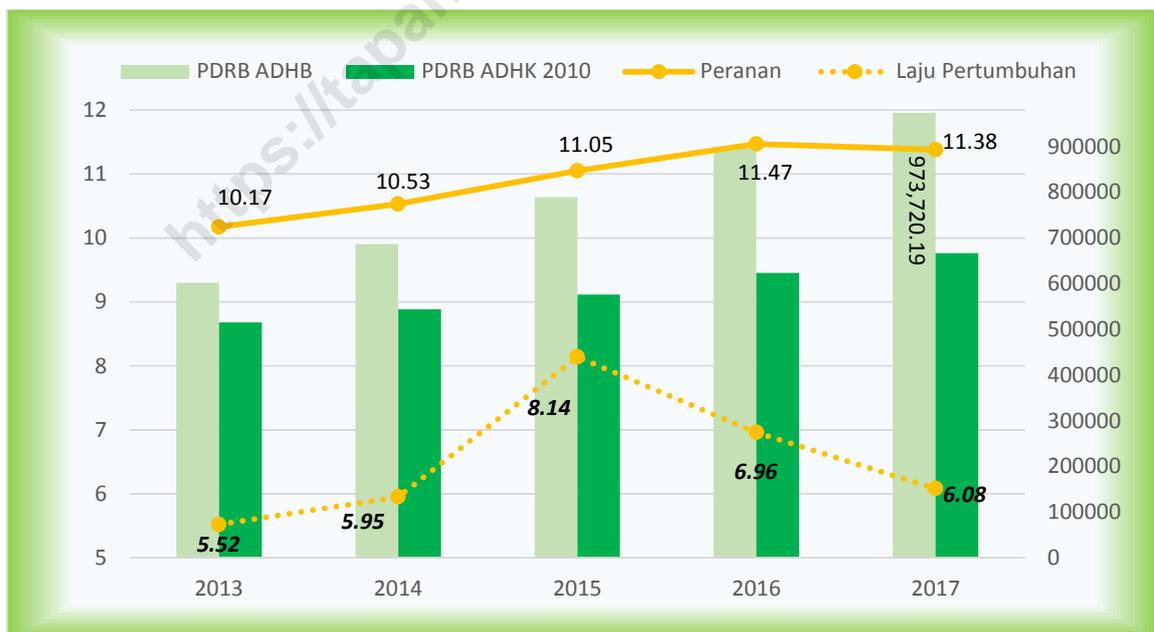
Tabel 4.8. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Tapanuli Tengah, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	601.711,85	686.310,15	789.121,39	900.265,72	973.720,19
- ADHK	515.500,46	543.957,82	576.308,36	623.244,35	666.621,28
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	10,17	10,53	11,05	11,47	11,38
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	5,52	5,95	8,14	6,96	6,08

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Grafik 4.3. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi, 2013-2017



Jika dilihat dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan selalu mengalami percepatan dari 2013 sampai tahun 2015, namun pada tahun 2016 dan 2017 justru mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2017 mencapai 6,08 persen. Angka ini mengalami perlambatan dari pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 6,96 persen.

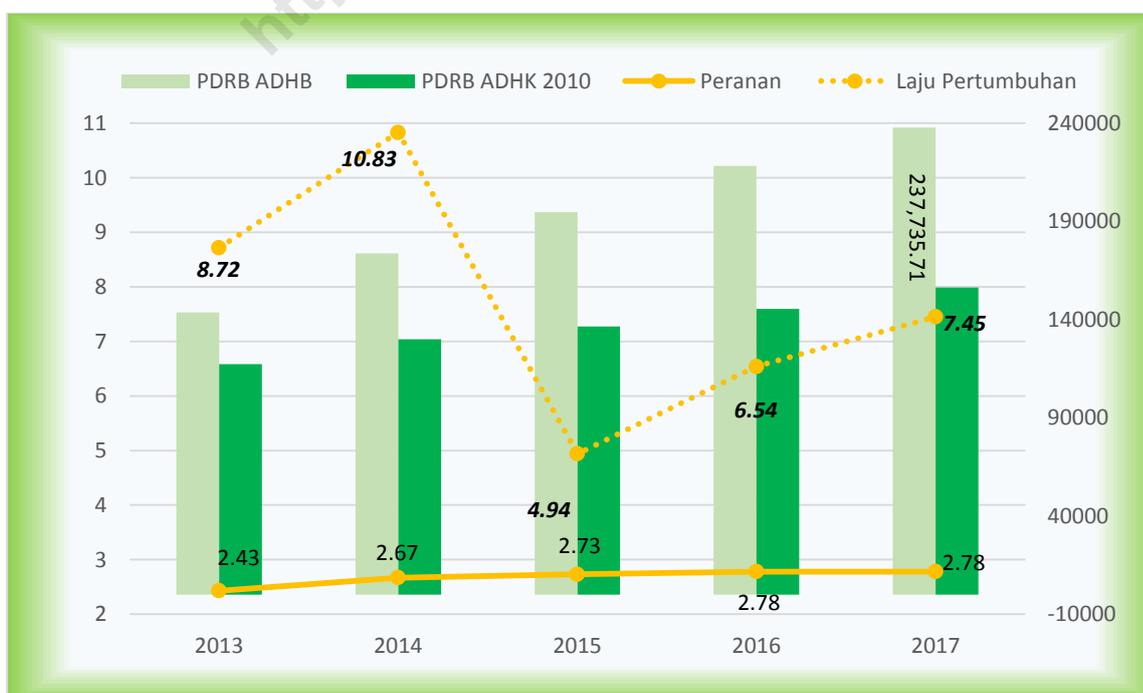
4.8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sublapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHB lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencapai 237,74 miliar rupiah meningkat dari 218,32 miliar rupiah pada tahun 2016.

Dilihat dari nilai kontribusinya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan berkontribusi sebesar 2,78 persen terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2017. Angka ini konstan dari tahun 2016 yakni mencapai 2,78 persen. Kontribusi ini terdiri dari sublapangan usaha Angkutan Darat dengan kontribusi terbesar mencapai 1,69 persen, sublapangan usaha Angkutan Udara sebesar 0,90 persen dan sublapangan usaha Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir sebesar 0,19 persen. Angkutan rel dan sungai tidak memiliki produksi di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dilihat dari laju pertumbuhannya, lapangan usaha ini memiliki laju pertumbuhan PDRB yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai 7,45 persen. Angka ini mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,54 persen.

Grafik 4.4. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, 2013-2017



4.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terbagi atas sublapangan usaha Penyedia Akomodasi dan sublapangan usaha Penyedia Makan Minum. Pada tahun 2017 lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menghasilkan nilai tambah sebesar 123,13 miliar rupiah atau meningkat 11 milyar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari nilai kontribusinya, lapangan usaha ini memiliki nilai kontribusi yang tetap selama tiga tahun terakhir, yaitu 1,4 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Nilai kontribusi itu terdiri dari kontribusi sublapangan usaha Penyediaan Akomodasi sebesar 0,18 persen dan sublapangan usaha Penyedia Makan Minum dengan kontribusi sebesar 1,26 persen terhadap total PDRB.

Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB, lapangan usaha ini memiliki laju pertumbuhan PDRB yang positif dengan trend yang cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, itu menunjukkan lapangan usaha ini memiliki percepatan laju pertumbuhan pdrb yang cukup konsisten. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 7,72 persen atau mengalami perlambatan dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 7,84 persen. Sublapangan usaha yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling cepat adalah sublapangan usaha Penyediaan Makan Minum dengan laju pertumbuhan mencapai 8,36 persen, sementara sublapangan usaha Penyediaan Akomodasi hanya mencapai pertumbuhan 3,59 persen.

Tabel 4.9. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	83.307,43	92.472,01	101.641,15	112.080,04	123.134,40
- ADHK	71.488,32	75.460,66	80.261,85	86.552,79	93.231,80
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	1,41	1,42	1,42	1,43	1,44
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	5,33	5,56	6,36	7,84	7,72

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.10. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha informasi dan komunikasi sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mencatat sebesar 50,25 miliar rupiah nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2017. Kontribusi lapangan usaha informasi dan komunikasi terhadap perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2013-2017 berturut-turut yaitu sebesar 0,63 persen, 0,61 persen, 0,60 persen, 0,59 persen dan tahun 0,59 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan percepatan, yaitu sebesar 5,50 persen, 5,77 persen 6,14 persen, 7,25 persen dan 5,57 persen berturut-turut dari tahun 2013-2017.

Tabel 4.10. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.455,45	39.581,81	42.929,32	46.102,89	50.252,10
- ADHK	36.395,27	38.496,60	40.861,59	43.824,06	46.264,20
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	0,63	0,61	0,60	0,59	0,59
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	5,50	5,77	6,14	7,25	5,57

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

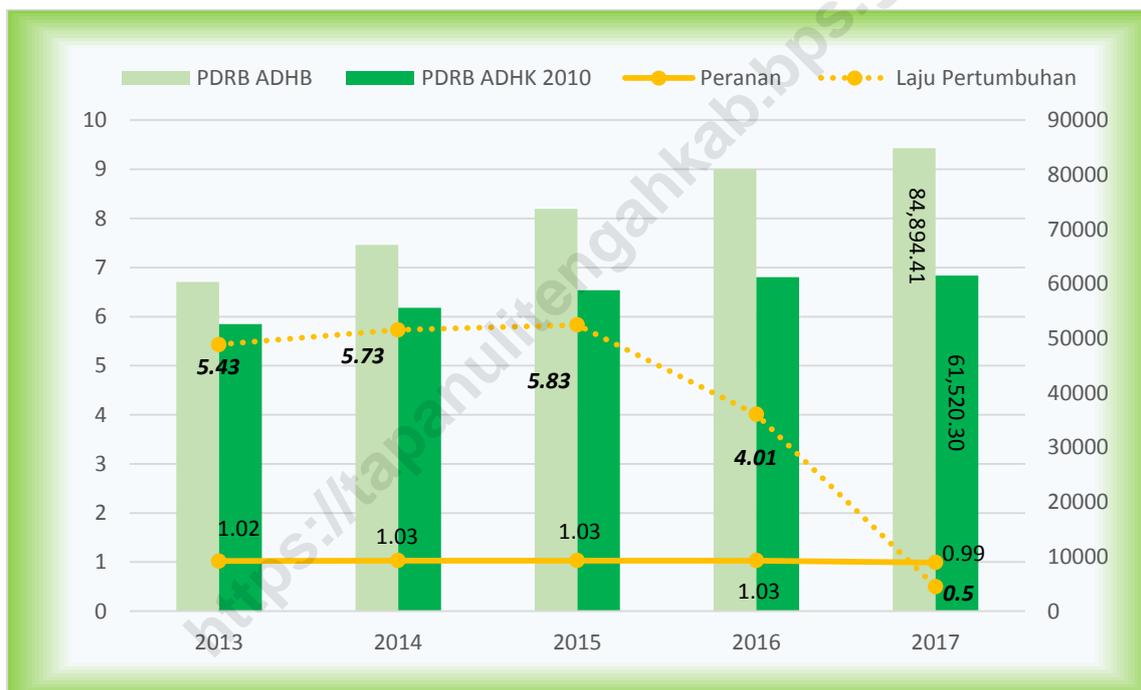
4.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Jasa keuangan dan asuransi terbagi atas 4 sublapangan usaha yaitu sublapangan usaha Jasa Perantara Keuangan, sublapangan usaha Asuransi dan Dana Pensiun, sublapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya, dan sublapangan usaha Jasa Penunjang Keuangan. Pada tahun 2017 PDRB ADHB lapangan usaha ini mencapai 84,89 miliar rupiah. Sementara kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 0,99 persen dimana 0,80 persen berasal dari sublapangan usaha Jasa Perantara Keuangan dan sebesar 0,19 persen dari sublapangan usaha Asuransi dan Dana Pensiun, sementara dua sublapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya dan sublapangan usaha Jasa

Penjunjang Keuangan tidak memiliki kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari sisi laju pertumbuhan ekonominya, lapangan usaha ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan menurun pada tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada tahun 2017 mencapai 0,50 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mencapai 4,01 persen.

Grafik 4.5. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, 2013-2017



4.12. Real Estate

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Real Estate menghasilkan sebesar 169,87 miliar rupiah nilai tambah selama tahun 2017. Lapangan usaha real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil dan cenderung selama tahun 2012-2015, dan pada tahun 2016 hanya mengalami sedikit peningkatan. Selama tahun 2013-2017, secara berturut-turut sumbangan lapangan usaha Real Estate sebesar 2,00 persen, 1,98 persen, 1,97 persen, 1,98 persen dan 1,99 persen terhadap total perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini selama 5 tahun terakhir bernilai positif dan terus meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Real Estate pada tahun 2013-2017 berturut turut yaitu 4,12 persen, 4,38 persen, 5,44 persen, 5,67 persen dan 6,12 persen.

Tabel 4.11. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estate, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	118.192,44	128.804,18	140.599,50	155.204,97	169.873,42
- ADHK	105.192,44	109.804,18	115.778,41	122.343,04	129.830,40
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	2,00	1,98	1,97	1,98	1,99
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	4,12	4,38	5,44	5,67	6,12

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

4.13. Jasa Perusahaan

Kegiatan perekonomian lapangan usaha jasa perusahaan menghasilkan sebesar 27,27 miliar rupiah selama tahun 2017. Kontribusi kegiatan ekonomi lapangan usaha jasa perusahaan terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah sangat kecil dan cenderung stabil dikisaran 0,29 persen sampai 0,31 persen selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan pula peranan lapangan usaha ini relatif kecil dibandingkan peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya pada perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami pertumbuhan positif pada tiga tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Jasa perusahaan pada tahun 2017 mencapai 5,22 persen.

Tabel 4.12. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	17.510,16	19.511,01	22.122,18	24.649,29	27.267,04
- ADHK	15.110,16	15.825,77	16.709,84	17.715,77	18.640,70
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	6,16	4,74	5,59	6,02	5,22

* Angka sementara, ** Angka sangat sementara

4.14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Pada tahun 2017 PDRB lapangan usaha administrasi pemerintahan mencatat sampai 736,82 miliar rupiah. Selama tahun 2013-2017 peranannya relatif stabil dengan tren yang meningkat. Adapun nilai kontribusinya secara berturut-turut yaitu sebesar 8,11 persen, 8,38 persen, 8,69 persen, 8,69 persen dan 8,61 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif tahun 2013-2017 berturut-turut yakni sebesar 5,91 persen, dan 6,92 persen, 6,57 persen, 5,27 persen dan 3,25 persen.

Tabel 4.13. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Tapanuli Tengah, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	479.720,31	545.860,52	620.390,15	682.429,17	736.820,91
- ADHK	406.720,31	434.853,63	463.406,63	487.829,30	503.672,50
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	8,11	8,38	8,69	8,69	8,61
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	5,91	6,92	6,57	5,27	3,25

* Angka sementara, ** Angka sangat sementara

4.15. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHB lapangan usaha jasa pendidikan mencapai 83,19 miliar rupiah. Sementara itu kegiatan ekonomi pada Jasa Pendidikan memiliki kontribusi yang cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Nilai kontribusi lapangan usaha ini kegiatan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2017 berturut-turut yaitu 1,05 persen, 1,03 persen, 1,02 persen, 1,00 persen dan 0,97 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Jasa Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Jasa Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2017 secara berturut-turut yaitu 4,82 persen, 5,16 persen, 5,48 persen, 5,02 persen dan 5,04 persen.

Tabel 4.14. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	62.165,06	67.196,20	72.896,36	78.728,06	83.194,29
- ADHK	56.165,06	59.060,84	62.295,61	65.422,85	68.722,00
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	1,05	1,03	1,02	1,00	0,97
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	4,82	5,16	5,48	5,02	5,04

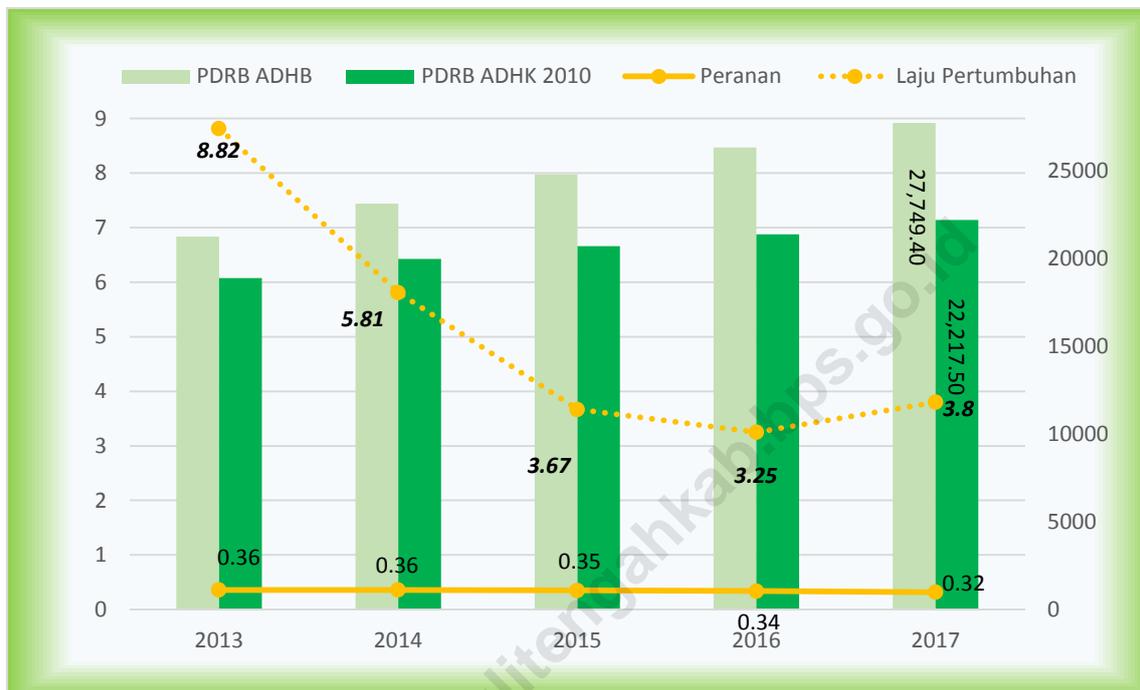
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Tahun 2017, PDRB lapangan usaha ini mencapai 27,75 miliar rupiah. Peranan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir (2015-2017). Adapun nilai kontribusi lapangan usaha ini terhadap total PDRB selama tahun 2013-2017 yaitu 0,36 persen, 0,36 persen, 0,35 persen, 0,34 persen dan 0,32 persen. Sementara itu, laju pertumbuhannya cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2017 laju pertumbuhan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencapai 3,80 persen.

Grafik 4.6. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2013-2017



4.17. Jasa Lainnya

PDRB Jasa Lainnya tahun 2017 hanya mencapai 7,68 miliar rupiah. Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah sangat kecil dan stabil selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,09 persen. Laju pertumbuhan Jasa Lainnya tahun 2017 mencapai 5,30 persen atau mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,10 persen.

Tabel 4.15. PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	5.260,50	5.789,12	6.442,47	7.108,84	7.677,55
- ADHK	4.660,50	4.935,12	5.240,61	5.560,29	5.855,10
Proporsi terhadap Total PDRB (% ADHB 2010)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Pertumbuhan PDRB (% ADHK)	5,76	5,89	6,19	6,10	5,30

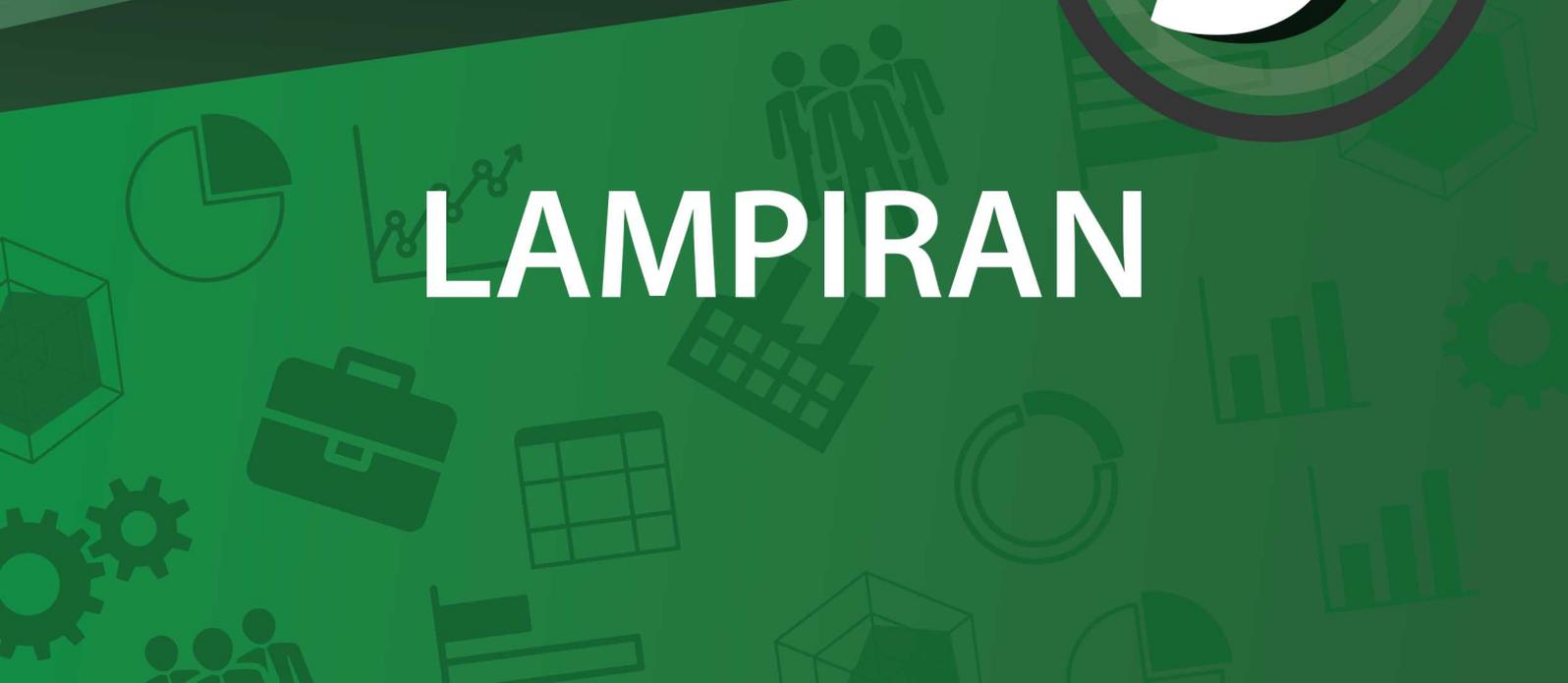
* Angka sementara ** Angka sangat sementara



<https://tapanulireg.kab.bps.go.id>



LAMPIRAN



Tabel 1. PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2013–2017

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2 892 345,08	3 110 744,63	3 373 728,04	3 664 216,25	3 960 772,31
B	Pertambangan dan Penggalian	15 766,35	17 054,64	18 578,98	20 455,46	22 482,80
C	Industri Pengolahan	713 384,29	783 068,79	836 477,21	908 929,00	987 122,98
D	Pengadaan Listrik Gas	34 638,44	35 368,15	35 845,61	37 933,06	48 789,26
E	Pengadaan Air	6 252,28	7 214,55	8 227,79	9 291,64	10 715,40
F	Konstruksi	620 990,90	713 500,91	778 054,23	876 555,90	1 003 273,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	601 711,85	686 310,15	789 121,39	900 265,72	973 720,19
H	Transportasi dan Pergudangan	143 721,06	173 712,44	194 675,04	218 318,01	237 735,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83 307,43	92 472,01	101 641,15	112 080,04	123 134,40
J	Informasi dan Komunikasi	37 455,45	39 581,81	42 929,32	46 102,89	50 252,10
K	Jasa Keuangan	60 358,13	67 134,24	73 730,61	81 043,46	84 894,41
L	Real Estate	118 192,44	128 804,18	140 599,50	155 204,97	169 873,42
M N	Jasa Perusahaan	17 510,16	19 511,01	22 122,18	24 649,29	27 267,04
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	479 720,31	545 860,52	620 390,15	682 429,17	736 820,91
P	Jasa Pendidikan	62 165,06	67 196,20	72 896,36	78 728,06	83 194,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21 266,35	23 138,81	24 815,87	26 342,04	27 749,40
R S T U	Jasa lainnya	5 260,50	5 789,12	6 442,47	7 108,84	7 677,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5 914 046.08	6 516 462.16	7 140 275.90	7 849 653.79	8 555 475.88

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2013–2017

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2 587 791,49	2 703 787,01	2 830 577,29	2 965 727,64	3 110 359 ,40
B	Pertambangan dan Penggalian	14 319,20	15 011,85	15 773,87	16 878,04	18 407 ,80
C	Industri Pengolahan	628 445,19	647 728,09	664 119,32	687 958,01	708 594 ,88
D	Pengadaan Listrik Gas	26 295,57	26 938,97	27 427,11	28 838,54	33 683 ,20
E	Pengadaan Air	5 333,85	5 644,56	5 963,68	6 367,40	6 821 ,55
F	Konstruksi	508 273,31	541 300,75	570 564,59	602 516,20	657 017 ,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	543 957,82	576 308,36	623 244,35	666 621,28	707 122 ,20
H	Transportasi dan Pergudangan	117 374,27	130 083,50	136 513,71	145 439,40	156 280 ,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	71 488,32	75 460,66	80 261,85	86 552,79	93 231 ,80
J	Informasi dan Komunikasi	36 395,27	38 496,60	40 861,59	43 824,06	46 264 ,20
K	Jasa Keuangan	52 598,37	55 611,51	58 852,59	61 214,67	61 520 ,30
L	Real Estate	105 192,44	109 804,18	115 778,41	122 343,04	129 830 ,40
M N	Jasa Perusahaan	15 110,16	15 825,77	16 709,84	17 715,77	18 640 ,70
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	406 720,31	434 853,63	463 406,63	487 829,30	503 672 ,50
P	Jasa Pendidikan	56 165,06	59 060,84	62 295,61	65 422,85	68 722 ,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18 896,35	19 994,68	20 729,44	21 403,30	22 217 ,50
R S T U	Jasa lainnya	4 660,50	4 935,12	5 240,61	5 560,29	5 855 ,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5 914 046,08	5 199 017,47	5 460 846,09	5 738 320,51	6 032 212,59

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	48,91	47,74	47,25	46,68	46,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
C	Industri Pengolahan	12,06	12,02	11,71	11,58	11,54
D	Pengadaan Listrik Gas	0,59	0,54	0,50	0,48	0,57
E	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
F	Konstruksi	10,50	10,95	10,90	11,17	11,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,17	10,53	11,05	11,47	11,38
H	Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,67	2,73	2,78	2,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,42	1,42	1,43	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	0,63	0,61	0,60	0,59	0,59
K	Jasa Keuangan	1,02	1,03	1,03	1,03	0,99
L	Real Estate	2,00	1,98	1,97	1,98	1,99
M N	Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,11	8,38	8,69	8,69	8,61
P	Jasa Pendidikan	1,05	1,03	1,02	1,00	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,36	0,35	0,34	0,32
R S T U	Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	4,85	4,48	4,69	4,77	4,88
B	Pertambangan dan Penggalian	4,21	4,84	5,08	7,00	9,06
C	Industri Pengolahan	4,34	3,07	2,53	3,59	3,00
D	Pengadaan Listrik Gas	2,26	2,45	1,81	5,15	16,80
E	Pengadaan Air	5,63	5,83	5,65	6,77	7,13
F	Konstruksi	6,39	6,50	5,41	5,60	9,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,52	5,95	8,14	6,96	6,08
H	Transportasi dan Pergudangan	8,72	10,83	4,94	6,54	7,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,33	5,56	6,36	7,84	7,72
J	Informasi dan Komunikasi	5,50	5,77	6,14	7,25	5,57
K	Jasa Keuangan	5,43	5,73	5,83	4,01	0,50
L	Real Estate	4,12	4,38	5,44	5,67	6,12
M N	Jasa Perusahaan	6,16	4,74	5,59	6,02	5,22
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,91	6,92	6,57	5,27	3,25
P	Jasa Pendidikan	4,82	5,16	5,48	5,02	5,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,82	5,81	3,67	3,25	3,80
R S T U	Jasa lainnya	5,76	5,89	6,19	6,10	5,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,18	5,04	5,08	5,12	5,24

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	4,54	2,94	3,60	3,66	3,07
B	Pertambangan dan Penggalian	3,17	3,18	3,68	2,90	0,78
C	Industri Pengolahan	5,78	6,50	4,18	4,90	5,44
D	Pengadaan Listrik Gas	0,28	(0,33)	(0,45)	0,64	10,12
E	Pengadaan Air	7,22	4,92	9,04	7,94	5,77
F	Konstruksi	5,91	9,11	7,89	3,45	6,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,28	3,42	7,66	6,32	6,66
H	Transportasi dan Pergudangan	7,08	9,06	6,79	5,26	1,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,48	5,16	3,34	2,26	1,99
J	Informasi dan Komunikasi	2,86	(0,09)	2,18	0,13	3,25
K	Jasa Keuangan	5,31	5,20	3,78	5,68	4,23
L	Real Estate	4,11	4,40	3,52	4,46	3,14
M N	Jasa Perusahaan	4,84	6,39	7,38	5,10	5,13
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,36	6,43	6,65	4,49	4,57
P	Jasa Pendidikan	2,28	2,79	2,85	2,84	0,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	2,83	3,45	2,81	1,48
R S T U	Jasa lainnya	4,13	3,93	4,80	4,00	2,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.03	4,90	4,27	4,58	3,57

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Jl. N. Daulay, Pandan, Sumatera Utara 22611 Telp:(0631) 371082, Fax: (0631) 372066;
Homepage: <http://tapanulitengahkab.bps.go.id>, E-mail: bps1204@bps.go.id